

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Suhendar. (2010). *Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governane (Implementasi UU No.14 Tahun 2008)*.
- Angguna, Y. P., & Gani, A. Y. A. (2015). Upaya Pengembangan *E-Government* Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang Yordan Putra Angguna, A. Yuli Andi Gani, Sarwono. *Jurnal Administrasi Publik*,3(1),80–88.
- Antoni, D A Darius Muhammad, I. H., & Muhamad, A. (2022). *E-Government Berbasis Information Technology Infrastructure*. In *E-Government Berbasis*
- Anwar, Khoirul dan Asianti, O. (2004). *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen bagi Pemerintah di Era Otonomi Daerah : SIMDA*. Pustaka Pelajar.
- Brebes, W. K. A. B., & Umum, K. (2010). *Gambaran Umum Kondisi Dan Potensi Wilayah Kab. Brebes* (hal. 1–41).
- Diah Rachma Aprianty. (2016). Penerapan Kebijakan *E-Government* Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1589–1602.
- Falih Suaedi, B. W. (2010). *Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan E-Governance*. Graha Ilmu.
- Ilman, A. A. N., & Arumsari, N. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis *Electronical Government* melalui Aplikasi Blakasuta di Tiga Kantor Kecamatan Kabupaten Brebes. *Unnes Political Science Journal*, 5(2), 69–73. <https://doi.org/10.15294/upsj.v5i2.50318>
- Indonesia, P. R. (2007). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. In *Ятыатат: Vol. ыы12у* (Nomor 235, hal. 245).
- Indonesia, P. R. (2009). UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- Lembaran Negara RI Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta, 2003(1), 20–28.*
- Indrajit, R. E. (2013). *Elemen Sukses Pengembangan*. 4(C), 1–4.
- Indriyani, E. (2016). *E-Government : konsep, implementasi dan perkembangannya di Indonesia* (Tim Insan Cendekia (Ed.); Cetakan pe). Solok : Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Balai Insan Cendekia, 2020.
- Indriyati dan Hayat. (2015). *Peranan Perawat dalam Kerangka Kinerja Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Keperawatan*. Jurnal Transformasi Administrasi.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia, nomor 3 tahun 2003. (2003). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003. *International Journal of Tropical Insect Science*, 8(4), 104–110.
- Pelopolin, E. (2022). *Analisis Pengembangan e-Government Melalui Layanan Informasi Publik di Diskominfo Kota Kupang*. 1–13.
- Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Peningkatan Daerah Kabupaten Brebes. (2016). In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Nomor Mi, hal. 5–24).
- RI, J. B. (2004). INPRESS NOMOR 3 TAHUN 2003 (Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*). In *Kaos GL Dergisi* (Vol. 2004, Nomor.82,hal.1–21).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147277/inpres-no-3-tahun-2003>
- RI, J. B. (2020). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Rianto, B. dkk. (2012). *Polri dan Aplikasi E-Government Dalam Pelayanan Publik*. Putra Media Nusantara.

- Richardus Eko Indrajid. (2016). *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Referensi*, xvi+166.
- Sekar Asih Handayani. (2022). Implementasi *E-Government* Melalui Aplikasi Sipaduko di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Pada Era New Normal. 2005–2003, 8.5.2017, 7787.
- Sinambela et al. (2014). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Online Public Access Catalog Perpustakaan Nasional RI.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. In 2017. ALFABETA
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. ALFABETA.
- Surdin, J. (2016). Analisis Kelayakan Implementasi *E-Government* Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Keagrariaan Di Kabupaten Pinrang. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 5(1), 178–191.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik* (Vol. 3, Nomor 4).
- Wawan Setiawan, S. S. (2017). *E-Government*. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah. *Government*
- Yasti, D. N. (2020). *Kualitas Pelayanan Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun_2019*.